

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

- A. A. Zainal Abidin Farid. 2007. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amarudin dan Zainal Asikin. 2010. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Andi Hamzah. 2010. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bagir Manan. 2005. *Penegakan Hukum yang Berkeadilan*, Jakarta: Varia Peradilan.
- Bahder Johan Nasution. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju.
- Barda Nawawi Arief. 2007. *Bunga Rampa Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Barda Nawawi Arief. 2007. *Perkembangan Sistem Pemidanaan di Indonesia*. Semarang: Pustaka Magister.
- Bawaslu DKI Jakarta. 2012. *Kompilasi Perbawaslu Penanganan Pelanggaran Pemilu*. Jakarta.
- Bryan A. Garner. 2005. *Black's law Dictionary*. The United States of America: Abridged Eighth Edition, Editor in Chief, Thomson/west.
- C.S.T Kansil. 1994. *Latihan Ujian Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil. 2004. *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Diana Halim Koentjoro. 2004. *Hukum Administrasi Negara*. Bogor Selatan: Ghalia Indonesia.
- E. Utrecht. 1958. *Hukum Pidana I*. Bandung: Universitas Padjajaran.
- Franz Magis Suseno. 1997. *Mencari Sosok Demokrasi, Sebuah Telaah Filosofis*. Jakarta: Gramedia.
- H.A. Zainal Abidin Farid. 1995. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hendra Nurtjahjo. 2006. *Filsafat Demokrasi*. Jakarta: Bumi Aksara.

- Jan Remmelink. 2003. *Hukum Pidana, Komentar atas Pasal-Pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padananya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Jimly Asshiddiqie. 2006. *Teori dan Aliran Penafsiran Hukum Tata Negara*. Jakarta: InHilco.
- Komariah Emong Saparadjaja. 2002. *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil Dalam Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Lawrence M. Friedman. 2009. *Sistem Hukum (Perspektif Ilmu Sosial)*. Bandung: Nusa Media.
- Lili Rasjidi dan Liza Sonia. 2016. *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Majda El. Muhtaj. 2005. *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Martiman Prodjohamidjojo. 1997. *Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mexsasai Indra. 2014. *Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Moeljatno. 1994. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Moh. Hatta. 2009. *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum dan Hukum Pidana Khusus*. Jakarta: Liberty.
- Moh. Kusnardi. 1987. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Sinar Bakti.
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim. 1987. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi HTN FH UI dan CV Sinar Bakti, Cetakan ke-7.
- Moh. Mahfud MD. 1999. *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Yogyakarta: Gama Media.
- Moh. Mahfud. 2014. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Moeljatno. 2000. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.

- Moeljatno. 1993. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Muh Yamin. 1982. *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Muladi. 1995. *Kapita Sekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Dipenogoro.
- Ni'matul Huda. 2005. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ni'matul Huda. 2005. *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review* UII Press, Yogyakarta: UII Press.
- O. C. Kaligis. 2006. *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Terdakwa dan Terpidana*. Bandung: Alumni.
- Pandji Setijo. 2009. *Pendidikan Pancasila Perspektif Perjuangan Bangsa*. Jakarta: Grasindo.
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Rapung Samuddin. 2013. *Fikh Demokrasi: Menguak Kekeliruan Haramnya Umat Terlibat Pemilu dan Politik*. Jakarta: Cetakan Pertama Gozian Press.
- Ridwan HR. 2016. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Roeslan Saleh. 1983. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Aksara Baru.
- Romli Atmasasmita. 2001. *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Penegakan Hukum*. Bandung: CV Mandar Maju.

- Ronny Hanitijo Soemitro. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Rozikin Daman. 1995. *Hukum Tata Negara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Satjipto Rahardjo. 2008. *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*, Gentapress, Yogyakarta: Gentapress.
- Satochid Kartanegara. 1955. *Hukum Pidana Bagian Pertama*. Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa.
- Sianturi. 1986. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta.
- Sodikin. 2014. *Hukum Pemilu: Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan*. Jawa Barat: Gramata Publishing.
- Soedikno Mertokusumo. 2003. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta.
- Soerjono Soekanto. 2010. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto. 2012. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 1985. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: CV Rajawali.
- Sudargo Gautama. 1973. *Pengertian Negara Hukum*, Bandung : Alumni.
- Sudarto. 1990. *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto.
- Sudarto. 1983. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*. Bandung: Sinar Baru.
- Sudikno Mertokusumo. 2010. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Cahya Atma Pustaka.

Sujatmo. 1986. *Beberapa Pengertian dibidang Pengawasan*. Jakarta: Balai Pustaka.

Teguh Prasetyo. 2014. *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers.

Titik Triwulan Tutik. 2007. *Eksistensi, Kedudukan, dan Wewenang Komisi Yudisial sebagai Lembaga Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Pasca Amandemen UU*. Jakarta: Prestasi Pustaka.

Wiryo Prodjodikoro. 2003. *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: PT.Refika Aditama.

## **2. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Amandemen ke-4

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang No. 3 Tahun 2018 Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Peraturan KPU No. 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara Pilkada.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.KOT-XVI/2018.

### **3. Sumber Lainnya**

<https://www.xkasus.com/2018/07/kasus-pilkada-tabalong-bukan.html>

<https://www.merdeka.com/peristiwa/kpps-buka-kotak-suara-tak-bersegel-tiga-tps-coblos-ulang-pilgub-riau.html>

<http://requisitoire-magazine.com/2018/09/13/ada-kotak-suara-dibuka-pemilihan-walikota-cirebon-diulang/>

[https://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt4be012381c490/sanksi-hukum-\(pidana,-perdata,-dan-administratif](https://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt4be012381c490/sanksi-hukum-(pidana,-perdata,-dan-administratif)

<http://digilib.unila.ac.id/12871/14/BAB%20II.pdf>